

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. BPD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.<sup>1</sup> Lembaga ini didirikan secara khusus untuk mendorong pembangunan dan memperkuat perekonomian di wilayah operasionalnya masing-masing. Peran tersebut dijalankan berdasarkan mandat dari pemerintah daerah, di mana BPD dipercaya untuk mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari keuangan daerah.

Salah satu bentuk kontribusi nyata BPD dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi adalah dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>2</sup> Oleh karena itu, BPD tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan juga menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melihat peran sentral tersebut, maka kemajuan industri BPD sangat dibutuhkan guna memastikan peran strategis tersebut dapat berjalan secara optimal.

---

<sup>1</sup> *Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027* (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), 3.  
<sup>2</sup> Galih Pratama, "OJK Tegaskan Peran Besar BPD dalam Mendorong Perekonomian Daerah," *Infobanknews.com*, 2024, <https://infobanknews.com/ojk-tegaskan-peran-besar-bpd-dalam-mendorong-perekonomian-daerah/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2025

Berdasarkan tinjauan dari sisi operasional, sektor keuangan syariah yang dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Puncak pertumbuhan aset terjadi pada tahun 2022, ketika total aset mencapai Rp73,5 triliun mengalami lonjakan sebesar 86,09% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan Rp39,5 triliun.<sup>3</sup> Peningkatan ini menjadi indikator positif atas kondisi industri yang semakin membaik, menunjukkan bahwa BPD Syariah mampu bertumbuh secara berkelanjutan meskipun berada dalam situasi penuh tantangan, termasuk dampak dari pandemi COVID-19.

Pandangan Prasetyo juga mendukung hal ini, dengan menyatakan bahwa peningkatan aset yang signifikan mencerminkan kinerja yang sehat serta prospek pertumbuhan perusahaan yang menjanjikan.<sup>4</sup> Pencerminan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan aset memiliki peran penting dalam meningkatkan laba perusahaan, yang selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi pengembangan usaha di masa mendatang.<sup>5</sup> Melalui pengembangan tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat perannya dalam perekonomian. Oleh sebab itu, BPD Syariah memiliki potensi besar untuk berperan lebih aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Adapun ilustrasi pertumbuhan asetnya selama beberapa tahun terakhir disajikan pada gambar berikut:

---

<sup>3</sup> *Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027*, 16.

<sup>4</sup> Aries Heru Prasetyo, *Valuasi Perusahaan (Pedoman untuk Praktisi dan Mahasiswa)* (PPM, 2011), 110.

<sup>5</sup> Wanitasari dkk., "The Effect Of Growth Level, Asset Structure, Liquidity And Profitability On Capital Structure," *Majalah Journal Of Islamic Finance And Management* 1, no. 1 (2021): 85.



**Gambar 1.1 Perkembangan Kinerja BPD Syariah**

Sumber: Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, 2024

Kendati secara keseluruhan aset Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2022, tidak seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) yang tergabung di dalamnya menunjukkan tren peningkatan yang serupa. Salah satu contoh yang menonjol adalah UUS BPD JATIM, yang justru mengalami penurunan nilai aset sebesar 19,95%, yakni dari Rp3,8 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp3,1 triliun pada tahun berikutnya.<sup>6</sup> Sebaliknya, UUS lain yang berada di wilayah Pulau Jawa menunjukkan performa yang lebih positif, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak setinggi angka rata-rata nasional sebesar 86,09%. Misalnya, UUS BPD JATENG mencatatkan kenaikan aset sebesar 17,42% dengan nilai mencapai Rp6,2 triliun di tahun 2022.<sup>7</sup> Sementara itu, UUS BPD DIY mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 21,86% hingga mencapai Rp1,9 triliun.<sup>8</sup> Adapun

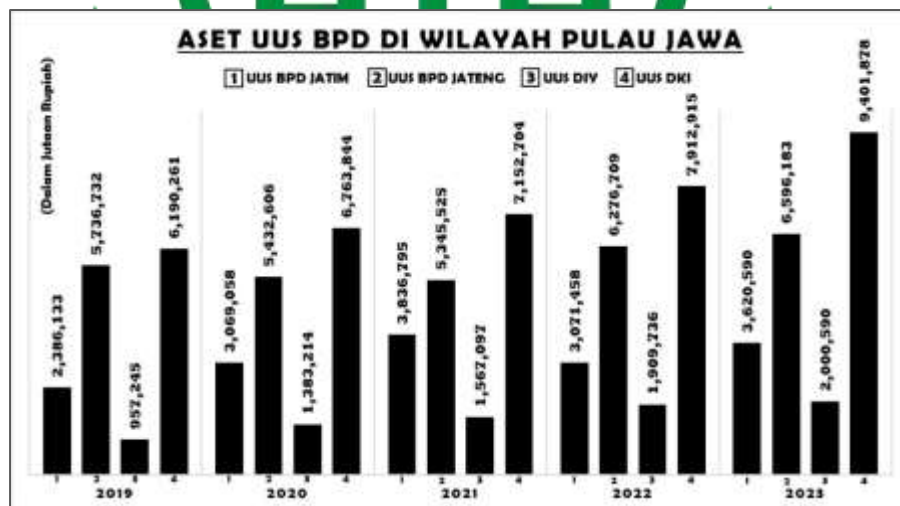
<sup>6</sup> Laporan Tahunan Bank JATIM 2019-2023 (PT BPD Jawa Timur, t.t.), 132–133.

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Bank JATENG 2019-2023 (PT BPD Jawa Tengah, t.t.), 169.

<sup>8</sup> Laporan Tahunan Bank DIY 2019-2023 (PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, t.t.), 166.

UUS BPD DKI menjadi unit dengan nilai aset tertinggi, yakni Rp7,9 triliun, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,63% pada tahun yang sama.<sup>9</sup>

Realitas ini mengindikasikan bahwa salah satu Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (UUS BPD) di Pulau Jawa, yaitu UUS BPD JATIM, berada dalam kondisi kinerja dan perkembangan yang kurang optimal. Situasi tersebut memperkuat pernyataan Prasetyo yang mengemukakan bahwa peningkatan aset yang tinggi merupakan indikator dari kinerja perusahaan yang sehat serta peluang pertumbuhan yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, meskipun secara agregat BPD Syariah menunjukkan pertumbuhan aset yang cukup besar, tidak semua Unit Usaha Syariah di bawahnya mengalami peningkatan yang sejalan. Ilustrasi mengenai kondisi aset masing-masing UUS BPD di Pulau Jawa ditampilkan dalam gambar berikut:



**Gambar 1.2 Aset UUS BPD di Wilayah Pulau Jawa**

Sumber: Laporan Keuangan UUS BPD JATIM, JATENG, DIY, dan DKI, 2019–2023

<sup>9</sup> *Laporan Tahunan Bank DKI 2019-2023* (PT BPD Daerah Khusus Ibukota, t.t.), 192.

Meskipun demikian, data demografis menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah umat Muslim di pulau ini tercatat mencapai sekitar 149 juta jiwa, dengan rincian sebaran sebagai berikut: 48 juta di Provinsi Jawa Barat, 40 juta di Jawa Timur, 37 juta di Jawa Tengah, 12 juta di Banten, 9 juta di DKI Jakarta, dan 3 juta di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>10</sup> Jumlah populasi yang sangat besar ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pasar yang sangat menjanjikan bagi pengembangan industri perbankan syariah, khususnya bagi Unit Usaha Syariah (UUS) milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang beroperasi di kawasan tersebut. Dengan potensi pasar yang begitu luas, seharusnya UUS BPD JATIM dapat mengoptimalkan ekspansi layanan keuangan syariahnya guna mendorong peningkatan aset secara lebih signifikan.

Selain tingginya potensi pasar Muslim di Pulau Jawa, data mengenai pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui Produk Domestik Bruto (PDB) turut memperkuat argumen tersebut. Berdasarkan laporan triwulan IV tahun 2023, wilayah Pulau Jawa tercatat sebagai kontributor terbesar terhadap total PDB nasional, yakni sebesar 57,05%. Persentase ini sebagian besar ditopang oleh aktivitas pada sektor Informasi dan Komunikasi, Perdagangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi.<sup>11</sup> Fakta ini mencerminkan bahwa iklim usaha, khususnya di sektor Jasa Keuangan termasuk perbankan, di kawasan ini

---

<sup>10</sup> Sekretariat Jendral, "Jumlah Penduduk Menurut Agama," Satu Data Kemenag, 2023, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>. Diakses pada tanggal 24 November 2024

<sup>11</sup> *Berita Resmi Statistik Triwulan IV 2023* (Badan Statistik Pusat, 2024), 20–21.

berkembang secara signifikan. Oleh sebab itu, peningkatan aset yang lebih optimal dari Unit Usaha Syariah (UUS) BPD di Pulau Jawa sangat mungkin untuk diwujudkan dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan tersebut. Data berikut menyajikan komponen utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa berdasarkan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) nasional:

**Tabel 1.1 Sektor Sumber Pertumbuhan Utama Pulau Jawa**

Jawa (4,96)	DKI Jakarta	1,40	Sumber pertumbuhan utama: > Informasi & komunikasi > Perdagangan > Jasa Keuangan
	Jawa Timur	1,25	
	Jawa Barat	1,14	
	Jawa Tengah	0,75	
	Banten	0,34	
	DI Yogyakarta	0,08	

Sumber: Berita Resmi Statistik Triwulan IV, 2023

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan industri BPD Syariah sangat diperlukan guna menunjang perannya yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun secara keseluruhan kinerja keuangan BPD Syariah tergolong baik, masih terdapat ketidakseimbangan dalam pertumbuhan aset antar Unit Usaha Syariah (UUS) di wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi hal yang cukup mengherankan, mengingat Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak sekaligus menyumbang kontribusi ekonomi tertinggi, khususnya melalui sektor Jasa Keuangan. Kenyataan bahwa masih ada UUS BPD yang mengalami penurunan aset, menjadi sinyal bahwa performa keuangannya

belum maksimal dan perlu mendapatkan perhatian serta evaluasi lebih mendalam.

Penilaian terhadap perkembangan industri BPD Syariah secara menyeluruh tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan aset atau potensi pasar semata. Aspek lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah performa keuangan serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup> Penurunan aset pun tidak selalu mencerminkan kondisi kinerja yang buruk, sebagaimana yang terjadi pada UUS BPD JATIM yang justru mencatat pertumbuhan kembali pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu penilaian yang lebih menyeluruh dan mendalam guna menyusun strategi pengembangan yang lebih tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode *Islamicity Performance Index* (IPI), yang tidak hanya mengukur dari sisi finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, UUS BPD dapat lebih mudah mengidentifikasi kelemahan yang dimiliki serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada masa depan.<sup>13</sup>

Selama ini, evaluasi terhadap kinerja bank syariah umumnya masih bergantung pada indikator-indikator keuangan yang bersifat konvensional. Ketergantungan tersebut menyulitkan upaya untuk menilai sejauh mana perbankan syariah menjalankan fungsi sosial dan misi dakwah yang melekat

<sup>12</sup> Husnul Khotimah dan Safriansyah, "Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah di asean melalui pendekatan *islamicity performance index*," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 20, no. 1 (2019): 52.

<sup>13</sup> Elissa Qathrunnada, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di ASEAN Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index* Dan *Maqashid Syariah Index*" (B.S. thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta, 2021), 6.

padanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan pengukuran yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, agar keberhasilan bank tidak hanya tercermin dari sisi keuntungan semata, melainkan juga dari kontribusi sosial yang mampu diberikan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan misi utama pendirian bank syariah, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat melalui sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>14</sup>

*Islamicity Performance Index* (IPI), yang diperkenalkan oleh Hameed pada tahun 2004, merupakan suatu metode penilaian kinerja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam melalui sejumlah indikator, antara lain *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, serta *Islamic Income vs Non-Islamic Income*. Metode ini memiliki perbedaan mendasar dengan pendekatan konvensional yang biasanya digunakan dan direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek profitabilitas semata.<sup>15</sup> Sebaliknya, IPI turut mempertimbangkan kontribusi sosial dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif tersebut, IPI mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam.

<sup>14</sup> Satia Nur Maharani dkk., "Reconstruction of Islamic Banking Performance Measurement Models: A Critical Thought," *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, no. 1 (2020): 155.

<sup>15</sup> Febby Nurrahmiyatul Quddus, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Islamicity Performance Index" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 8.

Penelitian yang membahas kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) juga telah dilakukan oleh Mabruroh dan rekan-rekannya (2024) melalui karya berjudul “*Pengukuran Kinerja Keuangan BUS Menggunakan Islamicity Performance Index*”. Temuan dalam studi tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang optimal. Meskipun seluruh dana investasi telah dialokasikan pada sektor halal dan pendapatan yang bersumber dari aktivitas *non-halal* telah berhasil diminimalkan, realisasi pembiayaan dengan skema bagi hasil masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat penyaluran *zakat* belum mencapai angka 1%, dan distribusi manfaat kepada para pemangku kepentingan dinilai belum proporsional, terlihat dari adanya ketimpangan antara kompensasi direksi dan karyawan.<sup>16</sup> Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian tersebut karena sama-sama memanfaatkan metode IPI, namun terdapat perbedaan pada pendekatan dan objek penelitian; Mabruroh menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif terhadap beberapa BUS, sementara penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif komparatif dengan objek UUS BPD yang berada di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Fazrah (2021) berjudul “*Analisis Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode 2018–2020*”. mengungkapkan bahwa

---

<sup>16</sup> Mabruroh dkk., “Pengukuran Kinerja Keuangan Bus Menggunakan Islamicity Performance Index,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 2057.

Bank Muamalat Indonesia dan BCA Syariah memperoleh nilai yang cukup baik pada indikator *Profit Sharing Ratio* (PSR). Namun demikian, seluruh bank syariah yang menjadi sampel dalam kajiannya menunjukkan skor yang rendah pada indikator *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Sementara itu, Bank Syariah Mandiri mencatatkan performa terbaik dalam rasio *Equitable Distribution Ratio* (EDR), dan seluruh bank yang diteliti telah menyalurkan dana investasinya sepenuhnya ke sektor yang halal. Hasil pengukuran pada rasio *Islamic Income vs Non-Islamic Income* (IInc vs NIIInc) juga menunjukkan capaian yang sangat positif.<sup>17</sup> Penelitian tersebut memiliki titik kesamaan dengan kajian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) serta membandingkan nilai antar rasio. Perbedaannya terletak pada objek dan metode yang digunakan; Isnaini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif terhadap enam Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan fokus pada Unit Usaha Syariah BPD di wilayah Pulau Jawa.

Penelitian ini tidak terbatas pada evaluasi kinerja tahun 2022 ketika terjadi lonjakan aset pada BPD Syariah, melainkan mencakup analisis menyeluruh terhadap kinerja UUS BPD di wilayah Pulau Jawa selama empat tahun terakhir. Pemilihan rentang waktu yang lebih panjang dimaksudkan untuk menghasilkan penilaian yang lebih utuh, mendalam, dan mewakili kondisi sebenarnya. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan

---

<sup>17</sup> Isnaini Fazrah, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* Periode 2018-2020" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 73–74.

perbandingan terhadap kinerja keuangan antar UUS BPD dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* sebagai alat ukur, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pijakan dalam proses evaluasi serta arah pengembangan strategis ke depan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik penelitian berjudul; "Perbandingan Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Jawa berdasarkan *Islamicity Performance Index*". Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kinerja UUS BPD di wilayah Pulau Jawa, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari aspek penerapan nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan daya saing serta memperkuat peran strategis UUS BPD dalam mendukung pembangunan ekonomi di tingkat regional.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dirancang guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang mencakup dua fokus utama:

1. Bagaimana kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Jawa melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antar Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Jawa melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang guna menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang mencakup dua fokus utama:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di wilayah Pulau Jawa melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*.
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Jawa melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang guna memberikan manfaat atas tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, yang mencakup dua fokus utama:

1. **Secara Teoritis**
  - a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai topik serupa.
  - b. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah literatur terkait Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah, khususnya mengenai perbandingan kinerja keuangan berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index*, yang diharapkan bermanfaat di masa mendatang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi manajerial, terutama bagi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Jawa, dalam mengidentifikasi kelemahan kinerja dan merumuskan strategi perbaikan di masa depan.
- b. Bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memahami dan mengevaluasi kinerja bank melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*, sehingga mereka dapat lebih teliti dan selektif dalam menempatkan kepercayaan, baik dalam bentuk investasi, transaksi, tabungan, maupun aktivitas lainnya.



**UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM**